

PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI DI PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MAKASSAR

Nurmayanti^{1*}, Abdul Mahsyar², Alimuddin Said³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This research aimed to know the direct and indirect control which have been done by a company employee of a slaughterhouse Makassar city in managing slaughterhouse in Makassar city. The type of this research is qualitative research by describing the form of the direct and indirect control performance employees. This kind of research is phenomenological research. In collecting data, the researcher use observation, interview, and documentation technique. Data analysis technique use data reduction, data presentation, and conclusion. To determine the validity of the data used triangulation technique, time triangulation, and source triangulation. The results of this research was indicate that direct and indirect control by employees of local companies slaughterhouse of Makassar city in managing slaughterhouses considerate that employees performance has not been maximized, the researcher still found productive female animals and animals died that are not slaughtered, and the slaughterhouses is uncleanliness and it hygiene are also not found.

Keywords: *controlling performance, employees*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan pegawai perusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar dalam mengelola rumah potong hewan di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung kinerja pegawai. Tipe penelitian ini adalah fenomenologi. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan pegawai perusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar dalam mengelola rumah potong hewan dianggap kurang dan kinerja pegawainya belum maksimal, masih ditemui hewan betina produktif dan hewan mati yang lolos potong, kebersihan dan ke higienisan juga tidak terdapat pada rumah potong hewan.

Kata kunci: *pengawasan, kinerja, pegawai*

* nurmayanti@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan birokrasi adalah manajemen untuk sumber daya manusia. Dalam manajemen ada terdapat fungsi-fungsi agar semua pekerjaan yang dilakukan dalam semua pelaksanaan kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu fungsi dari manajemen adalah pengawasan. Pengawasan memiliki peranan yang penting dalam menentukan suatu pencapaian tujuan.

Siagian (2003) berpendapat bahwa pengawasan merupakan keseluruhan pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan atau organisasi bertujuan untuk menjamin segala keseluruhan pekerjaan yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan penyelewengan dan kecurangan dalam penggunaan kekuasaan, keuangan, dan kedudukan tidak akan terjadi. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam rencana.

Dalam setiap pengawasan kegiatan atau pekerjaan dalam prakteknya terdapat tata cara, Teknik-teknik pengawasan yang efektif dan maksimal dalam suatu metode. Adanya

pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya akan membangkitkan motivasi dan keseriusan pegawai saat bekerja sehingga dapat memperbesar peluang dari instansi pemerintah untuk mencapai target yang ada karena memiliki pegawai berkinerja tinggi, mengingat bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan suatu program akan bergantung kepada hasil kerja kinerja pegawainya.

Pengawasan kinerja pegawai pada dasarnya merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu perusahaan. Pengawasan merupakan kegiatan pemimpin dalam organisasi yang mengusahakan agar tugas-tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang diinginkan. Pengawasan adalah suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan adanya pengawasan setiap perusahaan akan mendapatkan pegawai yang memberikan prestasi kerja seperti pada perusahaan badan usaha milik negara yang sekarang ini sebagai salah satu yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia.

Perusahaan daerah rumah potong hewan masih belum memenuhi syarat sebagaimana dalam dalam SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2006, sebagaimana dikatakan Rumah Potongan Hewan atau yang biasa selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan. Pengawasan hewan sebelum dan setelah dipotong harus betul-betul diperhatikan apakah memenuhi syariat islam atau tidak. Kondisi rumah potong hewan (RPH) juga sangat penting untuk diperhatikan, kebersihan, kehalalan, sanitasi dan kehygienisannya juga bau yang tidak sedap. Selain bangunannya yang sudah tidak layak lagi pengawasan kesehatan hewan oleh para pegawai RPH tidak maksimal seperti sebagian hewan sakit masih lolos potong, para pegawai juga sangat kurang pengawasan terhadap pengolahan limbah dari kotoran hewan yang telah dipotong seperti sekarang ini telah menumpuk dan menghasilkan bau menyengat yang tercium sampai di dekat lokasi pemukiman penduduk. Oleh karena itu maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan pegawai perusahaan daerah di rumah potong

hewan tersebut Diperlukan pengawasan pegawai dari perusahaan daerah RPH agar dapat mengelola RPH dengan baik.

Pengawasan tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila seorang pimpinan hanya bergantung kepada laporan saja. Karenanya pengawasan tidak langsung saja belum cukup. Seorang pemimpin sangat bijaksana apabila seorang pimpinan organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu dalam sebuah organisasi.

Darnisa (2005) menjelaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk memenuhi apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil-hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan dan apabila pelaksanaannya menyimpan dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi ini akan mencapai sasarannya apabila pemimpin mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya.

Darnisa (2005) menjelaskan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke

dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai factor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang menghambat sebuah kegiatan.

Siagian (2003) mengatakan terdapat dua macam teknik untuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dimana seorang pimpinan dalam organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Pengawasan langsung ini biasa berbentuk seperti: inspeksi langsung, *on-the-spot observation*, dan *on-the-spot report*, berarti sekaligus dalam suatu pengambilan keputusan *on-the-spot* pula jika perlu. Akan tetapi karena banyak dan kompleksnya tugas-tugas seseorang pimpinan terutama dalam sebuah organisasi yang besar dimana seorang pimpinan atau pemimpin sangat tidak mungkin dapat selalu menjalankan tugas pengawasan langsung itu. Dan yang kedua pengawasan tidak langsung dimaksudkan adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut bias saja dapat berbentuk tertulis dan lisan.

Proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut: 1) Menentukan

standar-standar dipergunakan pada dasar pengawasan, mengukur suatu pelaksanaan pengawasan, 2) Yaitu membandingkan dalam pelaksanaan sesuai dengan hasil, standar, dan menentukan penyimpangan jika ada terjadi, 3) Melakukan tindakan jika terdapat perbaikan, dan jika terdapat suatu penyimpangan agar dalam pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Sebuah rencana juga perlu dinilai dan dianalisis kembali, gunanya apakah rencana tersebut sudah benar-benar realistis atau tidak. Dan jika belum benar-benar realistis maka rencana itu perlu adanya perbaikan (Brantas 2009).

Kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas yang harus dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dipercayakan kepadanya. Kinerja sangat sering dikaitkan dengan tingkat produktivitas yang menunjukkan antara *input* dan *output* dalam sebuah organisasi (Syamsul Ridjal, 2010).

Ummi Masitahsari (2015) mengemukakan kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas yang harus dicapai seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan kepadanya.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat suatu pencapaian tujuan atau pelaksanaan kegiatan atau kebijakan atau program dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan, sasaran, yang telah tertuang dalam perumusan masalah strategis, (irham fahmi, 2010).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (meat cutting plant) telah ditetapkan persyaratan teknis RPH. RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan: 1. Pemotongan dari hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama), 2. Tempat dalam melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection), pemeriksaan karkas dan jeroan (post-mortem inspection) untuk mencegah penularan penyakit zoonosa ke manusia, 3. Tempat pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan post mortem guna pencegahan, pengendalian, dan

pemberantasan penyakit hewan menular zoonosis di daerah asal hewan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tipe penelitian kualitatif. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang didapatkan melalui hasil wawancara langsung dengan informan, Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Direktur utama Perusda RPH Kota Makassar, Direktur umum Perusda RPH Kota Makassar, Direktur operasional Perusda RPH Kota Makassar, Kabag humas Perusda RPH Kota Makassar, Karyawan Perusda RPH Kota Makassar, Pengusaha pemotong dan seksi umum dan kepegawaian dan seksi pemotongan hewan Perusda RPH Kota Makassar.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berbagai laporan ataupun dokumen-dokumen yang bersiat informasi tertulis yang berhubungan dengan pengawasan kinerja pegawai diperusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan juga dokumentasi. dalam menganalisis data peneliti

menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan Untuk pengabsahan data, digunakan tiga triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi data, dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan kinerja pegawai di perusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar pada penelitian ini dapat dilihat dari dua Teknik pengawasan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung meliputi a) inspeksi langsung, b) *on the spot observation*, c) *on the spot report*, sedangkan pengawasan tidak langsung meliputi pengawasan secara lisan dan tulisan.

Pengawasan langsung yaitu apabila seorang pimpinan dalam organisasi yang melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Pengawasan langsung dalam penelitian ini terdiri atas inspeksi langsung, *on the spot observation*, dan *on the spot report*.

Proses pengawasan di Perusahaan Daerah rumah potong hewan Kota Makassar berguna untuk Agar proses dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari

rencana yang telah ditetapkan. Perusda RPH Kota Makassar selama ini melayani pemotongan hewan berkisar 40-50 ekor per hari dengan jenis hewan yang dipotong sapi dan kerbau. Hewan yang dipotong di RPH semuanya milik pengusaha potong yang dikenakan tarif retribusi pemeriksaan daging dan retribusi pajak potong, juga retribusi pemakaian RPH Kota Makassar. Pemotongan hewan pada Perusda RPH Kota Makassar dilakukan setiap hari, waktu pemotongan dimulai pada pukul 02:00 sampai 06:00. Sebelum hewan dipotong pada pukul 15:00 dilakukan pemeriksaan hewan terlebih dahulu. Disinilah pegawai pada Perusda RPH Kota Makassar melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan apakah layak potong atau tidak.

Teknik Inspeksi langsung yaitu peninjauan secara pribadi, mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. di Perusda RPH kota Makassar mempunyai pegawai yang khusus bertugas pada bagian pengawasan dengan Teknik inspeksi langsung ditambah satu orang dokter, pegawai yang bertugas ini melakukan pengawasan terus menerus setiap hari dimulai dari beroperasinya proses pemeriksaan hewan sampai proses pemotongannya selesai, selain dari

pegawai yang ditugaskan pada bagian pengawasan terdapat satu dokter untuk melakukan pemeriksaan sebelum hewan akan dipotong. Tetapi pegawai Perusda RPH kota Makassar tidak pernah melakukan pengawasan dengan Teknik inspeksi langsung terhadap proses produksi daging yang terjadi di RPH, mereka datang ke Perusda hanya absen lalu pulang, para pegawai tidak pernah mengawasi mulai dari hewan datang ke RPH sampai kemudian dipotong. Padahal pengawasan terpenting yang harus dilakukan pegawai Perusda RPH kota Makassar yaitu terhadap hewan yang sudah lama mati tetapi masih lolos potong dan hewan sakit yang juga lolos potong. ini berdampak merugikan masyarakat karena tidak lagi mendapat daging yang segar dan layak untuk dikonsumsi. Sebagaimana Dalam Peraturan Pemerintah Kota Makassar No. 6 tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan adalah Menyediakan daging segar bagi konsumen dan melindungi konsumen dari daging yang tidak layak konsumsi.

Pengawasan langsung yang dilakukan pegawai Perusda RPH kota Makassar dimulai pada jam 15:00-22:00 pengawasan ini merupakan pengawasan hewan sebelum dipotong, hewan diperiksa apakah layak potong atau

tidak, bagaimana kesehatan hewan. pengawasan kesehatan hewan ini dilakukan oleh dokter yang berstatus pegawai di Perusda RPH kota Makassar. Dan pengawasan saat hewan akan dipotong dimulai pada pukul 01:00-06:00 Pengawasan ini guna menjamin pemotongan hewan sesuai dengan standar persepsi hewan yaitu direbahkan baru disembelih, karena syariat islam dalam menyembelih itu direbahkan dahulu, ini juga dapat menjamin bahwa daging yang dikonsumsi masyarakat itu pemotongannya sudah sesuai dengan syariat islam, Kehiegenisan hewan saat dipotong juga penting dilakukan pengawasan.

Adapun dalam bentuk-bentuk pengawasan yang ada pada Perusda RPH kota Makassar, 1) Pegawai pada Perusda kecuali mendapatkan izin kerja tidak diperbolehkan meninggalkan kantor, 2) Jika pegawai hendak meninggalkan kantor dengan alasan yang mendesak maka diharuskan membuat surat izin dan diserahkan kepada direksi RPH, 3) Dirut pada Perusda melakukan pengawasan kesetiap bagian memastikan jika pegawai ada dikantor, 4) Pegawai pada bagian pengawas melakukan pengawasan pada setiap jam kerja RPH mulai beroperasi sampai berakhir,

sekitar pukul 22:00-06:00, 5) Sebelum memulai pekerjaan pegawai terlebih dahulu mengisi absensi setiap pagi, dimulai pada pukul 08:00, 6) dan saat jam kerja berakhir karyawan juga diharuskan mengisi absensi, pada pukul 14:00.

Kedisiplinan juga penting dimiliki oleh setiap pegawai pada Perusda RPH Kota Makassar agar pengawasan yang dilakukan pegawai pada Perusda RPH Kota Makassar dapat berjalan secara maksimal sebagaimana yang telah diketahui kedisiplinan merupakan masalah yang sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan organisasi atau perusahaan. Tanpa adanya disiplin kerja akan berdampak menyebabkan pelaksanaan kerja terhambat ataupun tidak dapat diselesaikan dengan baik. Perusda RPH Kota Makassar memiliki peran besar dalam melakukan pengawasan terhadap proses beroperasinya RPH sebagai pusat produksi daging sesulawesi selatan. Pengawasan terhadap hewan sebelum dan sesudah dipotong, kesterilan daging hewan yang telah dipotong, kebersihan RPH, dan pengolahan kotoran hewan, dan cara pemotongan hewan yang sesuai dengan syariat islam. Pengawasan ini juga bertujuan menjamin masyarakat mendapatkan daging yang pasti kehalalan dan

kesehatannya terjamin utuh, aman atau biasa disebut dengan (ASUH).

Adapun peranan pengawasan pada Perusda RPH kota Makassar dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai yaitu: a) Menjamin dan mengusahakan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat dimaksudkan Sebelum melaksanakan sebuah kegiatan setiap perusahaan atau organisasi membuat perencanaan terlebih dahulu. Tujuannya rencana tersebut apat menjadi pedoman dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam suatu organisasi suatu kegiatan tidak akan memiliki tujuan dan sasaran tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Tanpa perencanaan suatu kegiatan tidak memiliki pedoman bagi yang menjalankannya. b) Mencegah terjadinya penyimpangan yaitu suatu pekerjaan kadang menyebabkan terjadinya penyimpangan fatal. Diperlukan suatu tindakan untuk mengetahui bahwa terjadinya penyimpangan, tindakan tersebut yaitu dilakukannya pengawasan. Dengan pengawasan pimpinan dapat mencegah dan mengetahui jika terdapat penyimpangan dalam pekerjaan. c) Memperbaiki suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjad yaitu kesalahan dalam suatu kegiatan biasa terjadi

dalam setiap pelaksanaan suatu pekerjaan baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar apabila tidak ditangani dengan baik akan mengganggu tercapainya tujuan dalam pekerjaan. Kesalahan bisa diakibatkan factor manusia dan non manusia. Oleh karena itu pengawasan sangat diperlukan agar tiap pelaksanaan kegiatan pimpinan dapat memonitor dengan baik agar kegiatan tetap pada alurnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Brantas (2009) yang menjelaskan tujuan dari pengawasan yaitu untuk melakukan tindakan dari perbaikan (*corrective*) jika terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*), Membuat suasana keterbukaan, jujur, partisipasi, dan akuntabilitas dalam organisasi, Meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi, Meningkatkan kelancaran operasi dalam suatu organisasi, dan Mencegah untuk terulangnya kembali suatu kesalahan itu, penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan, masalah, dan juga ketidakadilan.

Pengawasan *On the spot observation* merupakan pengawasan langsung di tempat pengamatan untuk melihat sendiri bagaimana cara petugas operasional dalam menyelenggarakan tugas dan menyelesaikannya, a) Pada Perusda RPH kota Makassar pengawasan dengan cara on the spot

observation dilakukan oleh ketiga direktur Perusda RPH kota Makassar yaitu direktur utama, direktur umum, dan direktur operasional. akan tetapi sama halnya dengan pegawainya ketiga direktur Perusda RPH sangat cuek dengan tugasnya. Banyak yang mengeluhkan kinerja ketiga direktur di Perusda RPH kota Makassar. Sebagaimana Brantas (2009) mengemukakan dalam melakukan pengawasan oleh suatu pimpinan perlu diketahui karakteristik yang efektif agar pengawasan dapat berjalan dengan maksimal yaitu: Akurat, Tepat waktu, Menyeluruh atau obyektif. pengawasan dimaksudkan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Pengawasan yang dilakukan oleh Ketiga direktur RPH tidak berjalan dengan maksimal. Ketiga direktur Perusda RPH Kota Makassar hanya datang mengawasi jika mendengar berita bahwa pihak dinas peternakan akan melakukan sidak terhadap hewan yang akan dipotong dan jika datang pihak yang mengatasnamakan LSM mendemo. Selain mempunyai tanggung jawab terhadap pengawasan secara on the spot observation ketiga direktur

pada Perusda RPH kota Makassar juga bertanggung jawab terhadap ketersediaannya sarana dan prasarana yang wajib RPH miliki seperti instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), tempat peristirahatan hewan setelah dipotong, dan kebersihan RPH.

Pengawasan on the spot report merupakan pengawasan pada laporan yang diberikan oleh bawahan secara langsung atas hasil pekerjaannya. Pada Perusda RPH kota Makassar pengawasan bawahan terhadap atasan sangat jarang terjadi hal ini karena antara pimpinan dan bawahan sama-sama malas keperusahaan. Antara pimpinan dan bawahan hanya datang ke kantor untuk absen, antar bawahan dan pimpinan sama-sama mengejar absen yang dijadikan formalitas saja demi kelancaran cairnya gaji dan jika diperlukan dikemudian hari. Pimpinan sama sekali tidak memberikan contoh yang baik terhadap bawahan dengan malasnya datang keperusahaan dan malasnya mengawasi proses pemotongan hewan yang terjadi di RPH akibatnya bawahan juga ikut ikutan malas ke kantor, pimpinan sama sekali tidak memberi teguran ataupun sanksi jika bawahan malas ke kantor dan tidak menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Antara pimpinan dan bawahan sama-sama cuek dan tidak

peduli pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Hetty (2007) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa pimpinan tertinggi suatu instansi adalah yang bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan pegawai sebagai atasan langsung dari pegawai-pegawai. Bukan hanya hasil kerjanya saja yang dinilai namun perlu adanya pengawasan untuk memonitor atau mengetahui proses pencapaian hasil.

Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang secara tidak langsung dilakukan oleh pimpinan dalam suatu perusahaan dengan cara mempelajari laporan-laporan yang diterima dari bawahan baik lisan maupun tulisan. Pengawasan tidak langsung yang biasanya dilakukan di Perusda RPH Kota Makassar yaitu dengan cara lisan dan tulisan, secara lisan dapat berbentuk berkala, mendadak dan rutin dilakukan. Dan secara tulisan berbentuk laporan-laporan, dan juga absensi pegawai.

Dalam pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan pegawai Perusda RPH Kota Makassar berbentuk laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada direktur utama. Pengawasan tidak langsung ini berbentuk laporan dalam bentuk tertulis dan lisan. pegawai yang melakukan

pengawasan adalah pegawai yang ditempatkan pada bagian badan pengawas.

Pengawasan dalam bentuk tulisan yaitu pengawasan yang dilakukan pegawai dengan berbentuk laporan. Pada Perusda RPH Kota Makassar bentuk laporan tertulis yang dilaporkan bawahan kepada pimpinan yaitu absensi harian pegawai, tiap harinya pegawai mengisi absen dan jika ada pegawai yang hendak meninggalkan kantor maka pegawai tersebut diwajibkan untuk meminta izin dari pimpinan. Kenyataannya pegawai pada Perusda RPH Kota Makassar hanya datang dikantor untuk absensi setelah selesai absensi maka pegawai tersebut sudah pulang. absensi hanya digunakan sebagai formalitas agar laporan yang sampai pada pimpinan bersifat positif, para pegawai di Perusda RPH Kota Makassar sangat jarang masuk kantor mereka hanya ingin uang gaji saja sedangkan untuk melakukan pengawasan di rumah potong hewan sangat jarang dilakukan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Siagian (2003) dalam buku filsafat administrasi yang mengatakan kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu adalah sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif atau yang benar saja.

Dengan kata lain para bawahan ini mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang akan menyenangkan seorang pimpinan. Padahal, seharusnya seorang pimpinan yang baik akan menuntut bawahannya untuk bertanggung jawab dalam melaporkan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Oleh Sebabnya ialah bahwa jika hanya hal-hal positif saja yang dilaporkan, pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya dan kenyataan yang terjadi. Pengawasan tidak langsung secara lisan yaitu pengawasan yang dilakukan pimpinan pada Perusda RPH kota Makassar dalam bentuk pengawasan dari jarak jauh yang seringkali berbentuk Pengawasan secara mendadak. Pengawasan yang secara mendadak pengawasan yang biasanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan dilakukan secara mendadak atau yang biasa disebut dengan sidak. Pada Perusda RPH Kota Makassar tidak pernah melakukan pengawasan secara mendadak atau dengan istilah sidak. Pegawai Perusda RPH Kota Makassar tidak peduli mengenai hewan-hewan yang akan dipotong di RPH mulai dari kesehatannya, di Perusda RPH Kota Makassar memiliki satu orang dokter yang bertugas memeriksa hewan

sebelum dipotong apakah hewan lolos potong atau tidak. Pengawasan terhadap jenis kelamin hewan juga merupakan hal penting dilakukan dan merupakan salah satu peraturan pada Perusda RPH Kota Makassar yang melarang hewan betina yang masih produktif untuk dipotong, maupun kehiegenisan hewan yang telah dipotong. Pegawai di Perusda RPH Kota Makassar tidak pernah melakukan pengawasan secara mendadak pada RPH apakah cara potong hewan sudah sesuai dengan syariat islam atau belum.

Selain dalam bentuk pengawasan secara mendadak pimpinan pada Perusda RPH Kota Makassar juga melakukan pengawasan tidak langsung dalam bentuk Pengawasan secara berkala juga biasa dilakukan pada Perusda RPH kota Makassar, seperti pada saat rapat yang biasa dilakukan pada tiap minggu, atau satu kali dalam sebulan. Pengawasan ini guna untuk mengawasi kinerja pegawai apakah sudah berjalan dengan maksimal. memaksimalkan kinerja pegawai juga bukan hanya dilakukan melalui proses pengawasan juga dengan memberikan motivasi-motivasi kerja terhadap pegawai agar kinerjanya lebih baik.

Dalam meningkatkan kinerja pegawai melakukan pengawasan agar tetap baik pihak Perusda RPH

memberikan motivasi-motivasi, adapun bentuk motivasi yang diberikan: 1) dengan pencapaian terhadap kinerja terbaik pertahunnya, pihak perusahaan memberikan apresiasi kepada para pegawainya dan mendapatkan penghargaan, 2) pihak perusahaan membayar gaji para pegawai dengan tepat waktu, 3) perusahaan akan menyediakan kotak kritik dan saran untuk menyuarakan perusahaan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah didapat dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya, proses pengawasan kinerja pegawai pada perusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar adalah sebagai berikut: 1) pengawasan langsung meliputi: a) Teknik Inspeksi langsung, dimana Perusda RPH kota Makassar mempunyai pegawai yang khusus bertugas pada bagian pengawasan ditambah satu orang dokter, pengawasan ini masih kurang ditandai dengan masih lolos potong hewan betina produktif dan terdapat hewan sakit yang lolos potong. b) Pengawasan On the spot observation dilakukan oleh ketiga direktur Perusda RPH kota Makassar yaitu direktur utama, direktur umum, dan direktur operasional, Pengawasan yang

dilakukan oleh Ketiga direktur RPH tidak berjalan dengan maksimal dapat dilihat dari malasnya pegawai datang ke kantor. c) Pengawasan on the spot report Pada Perusda RPH kota Makassar yaitu pengawasan bawahan terhadap atasan. 2) pengawasan tidak langsung yang dilakukan pegawai Perusda RPH Kota Makassar dalam bentuk lisan dan tulisan. kedua Teknik pengawasan tidak langsung ini kurang maksimal ditandai dengan antara atasan dan bawahan kurang disiplin dan tanggung jawab terhadap tugasnya dilihat dari antara pimpinan dan bawahan sama sekali malas ke kantor dan sangat cuek kepada proses pemotongan hewan yang terjadi di RPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdar, Zulkifli. (2014). *Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kerbau di Rumah Potong Hewan Tamangapa Kecamatan Manggala Makassar* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Darnisa. (2016). Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Masitahsari, Ummi. (2015). *Analisis Kinerja Pegawai Dipuskesmas Jongaya Makassar* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Ridjal, Syamsul. (2010). *Teori Motivasi dan Kinerja Karyawan*. Makassar: Fahmi Pustaka.
- Siagian P, S. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian P, Sondang. (2006). *Manajemen Internasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2006 tentang Rumah Potong Hewan
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant).